

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Kedeputan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Umum Penilaian Kinerja Organisasi	1. Belum adanya pedoman yang mengatur penilaian kinerja organisasi instansi pemerintah 2. Masih banyak instansi pemerintah yang kualitas AKIP nya belum baik. 3. Diperlukan sebuah pedoman sederhana yang dapat menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan penilaian kinerja organisasi.	Perpres No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Kementerian PANRB	sedang dalam proses penyusunan	Lungsuran 2023

2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Umum Pengelolaan Konflik Kepentingan	1. Salah satu agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan; 2. bahwa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik; 3. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. Kementerian PANRB 2. Kemitraan (MoU/PKS)	proses pembahasan dengan mengikutsertakan unit lain.	Usulan Baru
---	--	--	--	---	--	-------------

		Umum Penanganan Benturan Kepentingan tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;				
3	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Perubahan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah	1. Masih tingginya pemerintah daerah yang belum melakukan Pembangunan ZI. 2. Penyesuaian syarat pengusulan ZI WBK bagi Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas	Kementerian Hukum dan HAM	sudah meibatkan Layanan Hukum dalam hal legaldrafting dan akan diusulkan untuk harmonisasi	Lungsuran 2023
4	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Tunjangan Kinerja Instansi Pusat	penyesuaian tunjangan kinerja kementerian/lembaga dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dibentuk Peraturan Menteri tentang Penyesuaian	1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan	1. Kementerian Keuangan 2. K/L terkait 3. Sekretariat Kabinet 4. Kementerian Hukum dan HAM	Telah dilakukan koordinasi terkait pembentukan peraturan Menteri dimaksud	Usulan Baru

		Tunjangan Kinerja Instansi Pusat	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi			
No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Amanat pasal 51 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	1. Kemen PANRB 2. K/L (Tim Koordinasi SPBE Nasional) 3. BKN	Proses perencanaan pembahasan	Lungsuran 2023
2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB Pedoman tentang Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Amanat pasal 53 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	1. Kemen PANRB 2. K/L (Tim Koordinasi SPBE Nasional)	1. Saat ini telah dilakukan finalisasi rancangan Permen.PANRB tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE	Lungsuran 2023

					dan telah dilakukan legal drafting oleh Layanan Hukum namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut terhadap PermenPAN tersebut 2. Telah masuk pada Silahkan	
3	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pola Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah	pengaturan dalam rangka percepatan implementasi paradigma baru (flexible working arrangement) yg fokus pada, fleksibilitas kerja waktu, tempat jumlah pekerjaan, pemanfaatan teknologi penunjang, dan aplikasi pendukung melalui cloud storage	PP 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. LAN 2. BKN 3. KASN 4. Instansi terkait lainnya	Hasil klarifikasi Tanggal 16 Agustus 2023 Telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan LAN dan dijadwalkan untuk melakukan pembahasan	Lungsuran 2023
4	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Indeks Kelembagaan	Instrumen evaluasi Kelembagaan dengan hasil indeks	Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi kelembagaan	Seluruh Instansi K/L	1. Telah dilakukan pembahasan dengan konsultan. 2. sedang dalam proses penyusunan karena belum	Lungsuran 2023

					melibatkan internal Kementerian PANRB	
5	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Manajemen Proses Bisnis pada Instansi Pemerintah	Disusun untuk mengintegrasikan Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 dan Permen PANRB No. 19 Tahun 2018	1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi 2. Peraturan Menteri PANRB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Seluruh Instansi K/L/D	Proses perencanaan	Baru
No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Kedeputan Sumber Daya Manusia Aparatur						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Kesehatan	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi	1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP 17 Tahun 2020 tentang	Kementerian PANRB dan Instansi terkait lainnya	Pembahasan Rancangan	Baru

2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi, Riset dan Inovasi	jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional		Pembahasan	Baru
3	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Perhubungan				Telaahan	Baru
4	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Kebencanaan				Usul Harmon	Baru
5	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat				Telaahan	Baru
6	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang				Usulan	Baru

	Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi					
7	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa				Telaahan	Baru
8	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Lembaga Administrasi Negara				Telaahan	Baru
9	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Ketahanan Negara				Usulan	Baru
10	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Pengawas Analis Legislatif				Usulan Harmon	Baru
11	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Perdagangan				Sudah diterbitkan Permen PANRB NO. 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Di	Lungsuran 2023

					Bidang Perdagangan	
12	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				Sudah diterbitkan Permen PANRB NO. 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Lungsuran 2023
13	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Penggerak Swadaya Masyarakat				Sudah diterbitkan Permen PANRB NO. 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Penggerak Swadaya Masyarakat	Lungsuran 2023
14	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024	Sebagai dasar kebijakan pengadaan ASN TA. 2024	1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	1. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 2. Instansi pembina	Telah selesai pembahasan internal, akan dilanjutkan dengan pembahasan dengan tim SDMOH	Baru

			Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS			
			4. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK			
No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Kedeputian Pelayanan Publik						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Perubahan Peraturan Menteri No. 92 Tahun 2021)	Proses atau tahapan pengusulan pembentukan MPP yang diatur di dalam PermenPANRB 92/2021 belum dapat mengakomodir kebijakan percepatan pembentukan MPP di setiap kabupaten/kota untuk itu perlu disempurnakan sebagaimana Perpres 89/2021 yang akan diperbaiki. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pengelolaan (operasional) MPP agar dapat memberikan	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Perpres 132 Tahun 2022; 5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016; 6. Permendagri Nomor 25 Tahun 2021	1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Investasi/BKPM, 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Masih dalam tahapan perencanaan	Lungsuran

		kepastian hukum dan petunjuk bagi penyelenggara dalam mengelola MPP.				
2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan disusun untuk memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip dan pedoman untuk menciptakan ekosistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang inklusif dan ramah Kelompok Rentan bagi Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; 2. PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017 3. SE Menpan RB No. 66 Tahun 2020	1. Kementerian PUPR 2. Kementerian Hukum dan HAM 3. Kementerian PPPA 4. Kementerian Sosial 5. Pemerintah Daerah	Dalam tahap permohonan penandatanganan Menteri PANRB	Baru
3	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Sebagai payung hukum dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (skm) secara online, mengingat aplikasi skm yang dibangun oleh Kementerian Kominfo akan segera dioperasionalisasi,	Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Hasil klarifikasi tanggal Desember 2023 akan dilakukan konfirmasi setelah adanya tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan BPS.	Lungsuran

		selain itu pedoman ini akan berfungsi sebagai landasan hukum untuk seluruh kegiatan pelaksanaan skm secara online meliputi sosialisasi, bimtek dan monev yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024.			2. Layanan Hukum akan melakukan koordinasi dengan Kumham terkait surat pengembalian harmonisasi	
4	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Perubahan Permen No. 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik Nasional	Tujuan dari perubahan peraturan ini adalah untuk menguatkan pengelolaan pengaduan dari sisi kelembagaan, pengelolaan, penghargaan dan sanksi, serta penyediaan aplikasi. Berdasarkan pada hasil inventarisasi masalah yang telah dilakukan, ditemukan beberapa urgensi peraturan menteri tersebut perlu dilakukan perubahan yaitu antara lain:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2. Perpres Nomot 96 Tahun 2012 3. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 4. Perpres Nomor 47 tahun 2021 5. PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 6. PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2021	Seluruh instansi pemerintahan dan BUMN yang terhubung pada SP4N-LAPOR!		Baru

		1. Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! yang belum optimal yang disebabkan oleh kecepatan dan kualitas penyelesaian aduan yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil dari Survei Kepuasan kepada masyarakat dan pengelola yang dilakukan pada tahun 2022, menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2020; 2. Pemanfaatan kanal aduan SP4N-LAPOR! yang belum optimal. Berdasarkan data jumlah pengaduan yang meningkat namun masih relatif rendah, mengingat pada Roadmap SP4N Tahun 2020-2024 ditargetkan untuk				
--	--	---	--	--	--	--

		menerima laporan sebanyak 1.8 juta; 3. Pemanfaatan data laporan dari SP4N-LAPOR! untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan publik masih kurang; serta 4. Berkembangnya kompleksitas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada pengelolaan pengaduan dengan berdasarkan pada data jumlah instansi yang terhubung dengan SP4N-LAPOR! saat ini meningkat secara signifikan serta adanya perubahan arah kebijakan pada skala nasional yang menuntut adanya perubahan tata kelembagaan dalam pengelolaan pengaduan.				
--	--	---	--	--	--	--

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Tunjangan Kinerja	Merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2020-2024, salah satu yang menjadi isu strategis dalam aspek Sumber Daya Manusia adalah peningkatan objektifitas penilaian kinerja individu terkait dengan tunjangan kinerja pegawai yang diberikan. Salah satu bentuk quick wins internal dalam percepatan isu strategis, bahwa Kementerian PANRB menetapkan pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan capaian kinerja pegawai. Selain itu, terdapat perubahan kebijakan nasional terkait Manajemen Kinerja, Disiplin Pegawai, dan Tugas Belajar, sehingga konsep pemberian	1. PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 2. PP Nomor 30 Tahun 2019 3. PP Nomor 94 Tahun 2021 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2020 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2020	Internal Kementerian PANRB	Penyusunan rancangan sudah selesai, dan pada tanggal 26 Desember 2022 telah dilaksanakan harmonisasi internal dengan mengundang perwakilan seluruh unit kerja. Saat ini sedang menunggu proses paraf koordinasi.	Lungsuran

		tunjangan kinerja berdasarkan IPP dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2020 serta beberapa muatan materi dalam ketentuan tersebut perlu dilakukan penyesuaian.				
2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu untuk melakukan pengubahan atas Permenpan no 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB untuk mewujudkan	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan	Internal Kementerian PANRB	Penyusunan rancangan dan Pembahasan internal.	Lungsuran

		organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Permen PANRB No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB			
3	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pencabutan Peraturan Menteri PANRB No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian PANRB	Permenpanrb No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian PANRB sudah berlaku selama 4 Tahun sehingga diperlukan penyesuaian dengan adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya.	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor	Internal Kementerian PANRB	Penyusunan rancangan	Lungsuran

			25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan			
4	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pencabutan Peraturan Menteri PANRB No. No. 12 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian PANRB	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 menyatakan bahwa Kementerian PANRB harus menyusun proses bisnis yang kemudian diatur dengan Peraturan Menteri. Hal ini selaras secara jenis dan jenjang peraturan perundang-undangan, di mana mandat yang berasal dari Peraturan Presiden pada umumnya diturunkan dalam Peraturan Menteri. Analogi berdasarkan hal tersebut menjadikan peta proses bisnis yang telah ditetapkan dalam	1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PANRB 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses	Internal Kementerian PANRB	Penyusunan Draf	Lungsuran

		Keputusan Menteri menjadi tidak sesuai secara jenis peraturan dan harus segera dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Menteri. Namun hal tersebut menjadi kurang selaras jika dibandingkan dengan pedoman sebagaimana dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa peta proses bisnis ditetapkan oleh pimpinan instansi dengan surat keputusan. Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2021 juga hanya dinyatakan bahwa proses bisnis di lingkungan Kementerian PANRB ditetapkan oleh Menteri PANRB, yang menjadikan ketetapan peta proses bisnis saat ini telah sesuai dan tidak perlu diubah jenisnya. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan tim perumusan kebijakan sistem kelembagaan	Bisnis Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2020-2024			
--	--	--	--	--	--	--

		dan tata laksana pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana diketahui bahwa jenis ketetapan peta proses bisnis cenderung dibebaskan.				
No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Biro Data, Komunikasi dan Informasi						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang pencabutan Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Substansi pada Permenpan dimaksud sudah tidak sesuai terkait dengan mekanisme pelayanan informasi pada lampiran PermenPANRB No. 45/2012	1. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2021	Komisi Indonesia Pusat	Penyusunan Rancangan	Lungsuran

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Biro Umum dan Keuangan						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Tata Kelola Kearsipan di Kementerian PANRB	Landasan kebijakan tentang mekanisme penyelenggaraan kearsipan di KemenPANRB, termasuk diantaranya organisasi kearsipan, SDM kearsipan, kewajiban dan kewenangan substansi kearsipan dan unit pengolah, kewajiban tersedianya arsip yang andal, tertib, dan terpelihara, pengelolaan arsip dinamis, pelaporan arsip dinamis unit kerja, pengelolaan arsip vital dan terjaga, penyusutan menjadi arsip statis atau pemusnahan, hingga pengawasan kearsipan baik eksternal dan internal. Selain itu, sejumlah klausa mengalami perubahan dari rancangan sebelumnya menyesuaikan perubahan signifikan pada proses bisnis,	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 3. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara lain Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019	ANRI	Drafting dan Pembahasan internal.	Lungsuran

		organisasi, tugas fungsi, dan tata kerja Kementerian PANRB.				
2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian PANRB	Beradaptasi dengan sejumlah perubahan yang ada pada organisasi dan teknologi di Kementerian PANRB, maka perlu diakomodir sejumlah penyesuaian antara lain perubahan Logo Kementerian PANRB yang berpengaruh terhadap legalisasi naskah dinas dan korespondensi kedinasan, sistem dan aplikasi yang digunakan, penggunaan tanda tangan elektronis, kewenangan pengesahan dan penomoran, hingga perubahan organisasi dan tata kerja.	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 3. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara lain Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019	ANRI	Drafting dan Pembahasan internal.	Lungsuran
3	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Klasifikasi Kearsipan di Kementerian PANRB	Perubahan SOTK dan tugas fungsi Kementerian PANRB yang signifikan memerlukan revisi klasifikasi dokumentasi dan kearsipan sebagai dasar pembuatan naskah dinas, pengelolaan naskah,	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009	ANRI	Drafting dan Pembahasan internal. Sebelumnya telah diajukan ND ke unit hukum terkait rancangan dimaksud, tetapi di hold guna mengakomodir sejumlah	Lungsuran

		korespondensi, hingga penyusutan naskah. Selain itu sebagai salah satu penjamin aspek legalitas dan akuntabilitas dokumen yang tercipta.	3. PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2022 4. PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2021 5. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara lain Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019		perubahan. Selain itu, sedang dilakukan konsolidasi masukan atas penyampaian nota dinas terkait pengajuan usulan penyesuaian klasifikasi sesuai tugas dan fungsi organisasi berupa perubahan atau penambahan klasifikasi arsip.	
4	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Mengingat telah beberapa kali terjadi kerugian negara maka penting dan mendesak untuk mengembalikan kerugian negara dan menciptakan disiplin dan tanggung jawab PNS Non Bendahara dengan diperlukan regulasi tentang tata cara penyelesaian kerugian negara non bendahara di lingkungan Kementerian PANRB	1. PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 2. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	1. Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kementerian Keuangan	Sudah diajukan Nota Dinas Pengajuan Reviu dan Harmonisasi ke Bagian Hukum dengan Nomor Nota Dinas 104/BN.99/2021 Tanggal 29 Desember 2021. Pada tanggal 27 September 2022 telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tgl 28 September 2022 Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat perihal penyampaian	Lungsuran

					kembali rancangan peraturan menteri PANRB untuk disesuaikan dan dibahas kembali di internal Kementerian PANRB	
No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Status Usulan
Inspektorat						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pencabutan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian PANRB	Sehubungan dengan telah dicabutnya Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, sehingga saat ini ketentuan yang mengatur tentang Kode Etik APIP merujuk pada organisasi profesi yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Hal ini sesuai dengan mandat dalam Pasal 52 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa kode etik APIP disusun oleh	1. Permenpan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP 2. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh AAIPI	Internal Kementerian PANRB	Akan disusun Rpermenpan pencabutan	

		organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.				
2	Pencabutan Permenpan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB	Dalam rangka menyesuaikan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 sehingga hal-hal yang diatur dalam Permenpan Nomor 4 Tahun 2015 perlu dicabut dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri/Pedoman Menteri	Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Internal Kemeneterian PANRB	Akan disusun Rpermenpan pencabutan	

SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



RINI WIDYANTINI